

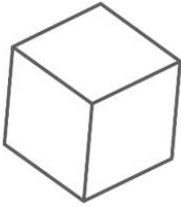
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2022



<https://halmahera.go.id>





INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN 2022

ISSN	:	977-279-7435-00-6
No. Publikasi	:	82020.2308
Katalog BPS	:	4102002.8202
Ukuran Buku	:	14.8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	:	52 + xii halaman
Naskah	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah
Gambar Kulit	:	<i>Unsplash.com, Freepik.com</i>
Diterbitkan oleh	:	© BPS Kabupaten Halmahera Tengah
Dicetak oleh	:	-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM LAPORAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022

Pengarah

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Umum

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Teknis

Ahmad Abdurrahman, SST

Penyunting

Fauzan Jodie Aldrian, S.Tr. Stat.

Penulis

Harjuni Ariska, SST

Desain

Harjuni Ariska, SST

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendaknya Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Tengah 2022” dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu upaya BPS Kabupaten Halmahera Tengah melihat secara garis besar masalah kesejahteraan penduduk ke dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Perlu diketahui bahwa publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan para pengguna data yang lain. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan saran dan masukan dalam penyusunan publikasi ini.

Weda, Juni 2023

Kepada Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Ahmad Abdurrahman, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	xiii
1.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	3
1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia.....	4
1.3 Perubahan Metodologi IPM.....	5
1.4 Implementasi IPM Metode baru di Indonesia.....	7
BAB II METODOLOGI.....	11
2.1 Dimensi Kesehatan.....	13
2.2 Dimensi Pendidikan (Pengetahuan).....	14
2.3 Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak).....	15
2.4 Penghitungan IPM.....	16
2.5 Menghitung Pertumbuhan IPM.....	16
2.6 Klasifikasi Pembangunan Manusia.....	17
BAB III KONDISI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.....	19
3.1 Letak Geografis.....	23
3.2 Kependudukan.....	25
3.3 Sosial Ekonomi.....	27
BAB IV POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA.....	29
4.1 Pembangunan Manusia.....	31

4.2	Kesehatan	34
4.3	Pendidikan	36
4.4	Kehidupan yang Layak	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		47
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran.....	50

<https://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Tengah	24
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, 2022	32
Gambar 3. IPM Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara, 2017-2022	33
Gambar 4. Umur Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara, 2017-2022 (tahun)	35
Gambar 5. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara tahun 2022 (tahun)	36
Gambar 6. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (tahun).....	39
Gambar 7. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (tahun)	40
Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (tahun).....	41
Gambar 9. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (tahun)	42
Gambar 10. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (juta/tahun).....	43
Gambar 11. Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (juta rupiah)	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	8
Tabel 2. Nilai Minimum dan Maksimum	9
Tabel 3. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (jiwa) ..	26

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan Metode Baru



~~Angka Melek Huruf~~
~~Harapan Lama~~
~~Sekolah~~



~~27 Komoditas PPP~~
~~96 Komoditas PPP~~



~~Rata-Rata Aritmatik~~
~~Rata-Rata Geometrik~~

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan merupakan proses peningkatan kemampuan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dilihat dari sisi pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin tingginya taraf hidup sebagian besar penduduk. Beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih mengalami masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia seharusnya juga menjadi tujuan dari pembangunan.

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki keinginan untuk dapat hidup layak, yaitu memiliki tubuh yang sehat, hidup di lingkungan yang nyaman dan aman, memperoleh pendidikan tinggi dan pendapatan yang mampu memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan hidup mereka. Pada akhirnya konsep pembangunan manusia sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya dilihat dari sisi ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia tidak hanya

memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia

Berdasarkan perspektif pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pendapatan semata, tetapi dari indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Pada tahap awal penyusunan indeks, pilihan diberikan pada

tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standart of living*). Ketiga dimensi tersebut diwakili dengan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan metode rata-rata aritmatik.

1.3 Perubahan Metodologi IPM

Sejak *launching* tahun 1990, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP memperbaharui metodologi penghitungan IPM yang kemudian dilakukan penyempurnaan kembali pada tahun 2011. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara diantaranya India di tahun 2011, Filipina tahun 2012 serta China di tahun 2013.

Perubahan metodologi IPM yang terjadi disebabkan oleh beberapa alasan yang disajikan pada rincian berikut:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM seperti angka melek huruf yang sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka

PENDAHULUAN

melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan metodologi IPM meliputi indikator dan metode penghitungan yang digunakan. Indikator dalam metode baru yang digunakan yaitu angka harapan lama sekolah dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, menggantikan angka melek huruf dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama. Sedangkan perubahan metode penghitungan IPM terjadi pada metode agregasi yang diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sedangkan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan

pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.4 Implementasi IPM Metode baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dalam pemenuhan datanya didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran.

Tabel 1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut.

Tabel 2. Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

BAB II METODOLOGI

Komponen IPM

**Dimensi
Kesehatan**

**Dimensi
Pendidikan**

**Dimensi
Kelayakan
Hidup**

BAB II

METODOLOGI

Perencana pembangunan manusia perlu menyadari bahwa yang berguna bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan hanyalah data atau informasi yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya (*represent reality*). Oleh karena itu, perlu dipahami secara memadai jenis pengumpulan data serta kualitas data yang dikumpulkan. Perencana pembangunan manusia juga harus dapat memanfaatkan data yang relevan secara optimal, baik yang dikumpulkan melalui sensus dan survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait; terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, serta pengeluaran rumah tangga. Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi dan menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring, dan evaluasi yang tepat.

Penghitungan Komponen IPM

2.1 Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

UHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2.2 Dimensi Pendidikan (Pengetahuan)

Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan

oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Indeks kesehatan dihitung rumus sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}, \text{ dengan}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS + HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad \text{dan} \quad I_{RLS} = \frac{RLS + RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

2.3 Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung *Power Purchase Parity* (PPP). Sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan, *share* 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.

Indeks pengeluaran (standar hitung layak) dihitung dengan rumus berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

2.4 Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

2.5 Menghitung Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian

yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM pada tahun (t)

IPM_{t-1} : IPM pada tahun ($t - 1$)

2.6 Klasifikasi Pembangunan Manusia

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

BAB III

KONDISI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2022

Rasio Jenis Kelamin

112,96

Artinya terdapat 112 - 113 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan

Rasio Ketergantungan

Artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) dibebani tanggung jawab terhadap 49 jiwa penduduk muda (0 - 14 tahun) ditambah penduduk tua (65 tahun keatas)

49,00

BAB III

KONDISI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3.1 Letak Geografis

Secara geografis, Halmahera Tengah dibatasi oleh wilayah Kabupaten Halmahera Timur di sebelah utara, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan di sebelah selatan, Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat dan Provinsi Papua Barat di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km² (2.276,86 km² daratan dan 6.104,65 km² lautan). Daerah Halmahera Tengah merupakan daerah pesisir dikarenakan sekitar 73 persen wilayahnya merupakan lautan, dan sisanya sebesar 27 merupakan daratan.

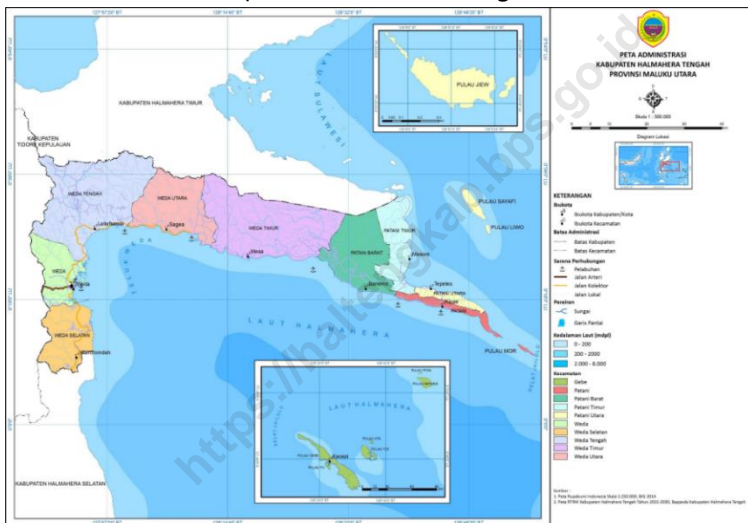
Hingga tahun 2022, secara administratif Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Weda, Weda Selatan, Weda Utara, Weda Tengah, Weda Timur, Pulau Gebe, Patani, Patani Utara, Patani Barat, dan Patani Timur. Kecamatan Weda Timur dan Patani Timur adalah kecamatan pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Tengah No. 5 Tahun 2013, dimana pada Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 61 desa, 2 desa persiapan dan 1 UPT (wilayah unit pemukiman transmigrasi setingkat desa).

Sembilan kecamatan di antaranya berada di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara,

KONDISI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

sedangkan satu kecamatan yakni Pulau Gebe yang terletak di sebelah timur Pulau Halmahera. Selain pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Tengah juga memiliki 37 buah pulau, namun di antara pulau tersebut hanya terdapat dua pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Gebe dan Pulau Yoi.

Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Tengah



Halmahera Tengah terletak di bagian tenggara pulau Halmahera dengan posisi antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94° 58' 21" sampai dengan 141° 01' 10".

3.2 Kependudukan

Penduduk Halmahera Tengah pada tahun 2022 tercatat sekitar 59.096 jiwa, yang terdiri dari 31.346 laki-laki dan 27.750 perempuan. Sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Halmahera Tengah adalah 112,96, yang berarti terdapat sekitar 112 sampai 113 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Dengan luas daratan 2.276,86 km², secara rata-rata setiap 1 km² dihuni oleh 25 hingga 26 jiwa.

Struktur penduduk Kabupaten Halmahera Tengah bisa dikatakan penduduk muda karena 29,01 persen dari total penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah berada di usia 0 hingga 14 tahun, dan sebanyak 60,87 persen berada pada usia produktif yaitu usia 15 hingga 54 tahun. Dengan kata lain, pemerintah daerah mempunyai beban cukup besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar termasuk guru serta sarana sekolah yang lain. Di sisi yang lain, pemerintah juga diuntungkan dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif jika pemerintah mampu membuka lapangan usaha bagi mereka.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (jiwa)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	3.153	3.067	6.220
05-09	2.875	2.671	5.546
10-14	2.791	2.588	5.379
15-19	2.608	2.381	4.989
20-24	2.863	2.474	5.337
25-29	3.222	2.596	5.818
30-34	3.015	2.299	5.314
35-39	2.463	2.078	4.541
40-44	2.104	1.899	4.003
45-49	1.739	1.505	3.244
50-54	1.368	1.360	2.728
55-59	1.140	955	2.095
60-64	852	740	1.592
65-69	584	505	1.089
70-75	325	356	681
75+	244	276	520

3.3 Sosial Ekonomi

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 49. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Halmahera Tengah (15-64 tahun) dibebani tanggung jawab 49 jiwa penduduk muda (0-14 tahun) ditambah penduduk tua (65 tahun ke atas).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar 102,31 persen dengan besaran PDRB Halmahera Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 sebesar 21,14 triliun rupiah dan PDRB Halmahera Tengah atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di tahun yang sama sebesar 10,61 triliun rupiah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Halmahera Tengah pada tahun 2022 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan kontribusi sebesar 60,55 persen. Selanjutnya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,81 persen, disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,69 persen. Berikutnya Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,24 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 2,16 persen.

BAB IV

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

IPM 2022

66,49

Angka Harapan Hidup

64,61
Tahun

Artinya setiap bayi yang lahir di Kab. Halmahera Tengah memiliki harapan untuk tetap hidup hingga usia 64,61 tahun.

Harapan Lama Sekolah

13,22
Tahun

Artinya setiap anak di Kab. Halmahera Tengah memiliki peluang mendapatkan pendidikan selama 13,22 tahun atau hingga Diploma I

Rata-Rata Lama Sekolah

9,02
Tahun

Artinya penduduk usia 25+ di Kab. Halmahera Tengah rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,02 tahun atau hingga kelas 3 SMP

Pengeluaran Perkapita

8,21
Juta
Rupiah

Artinya rata-rata pengeluaran perkapita (orang) di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 8,21 rupiah per tahun

BAB IV

POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Proses pembangunan sumber daya manusia merupakan interaksi berbagai komponen lintas sektor yang terjadi secara bertahap. Setiap tahapan pembangunan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang meliputi berbagai indikator/komponen sumber daya manusia dan ekonomi. Dalam era reformasi sekarang ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh, sehingga roda pembangunan diharapkan lebih dekat ke masyarakat, lebih cepat pelayanannya, lebih murah biayanya dan lebih sesuai dengan kebutuhan riilnya.

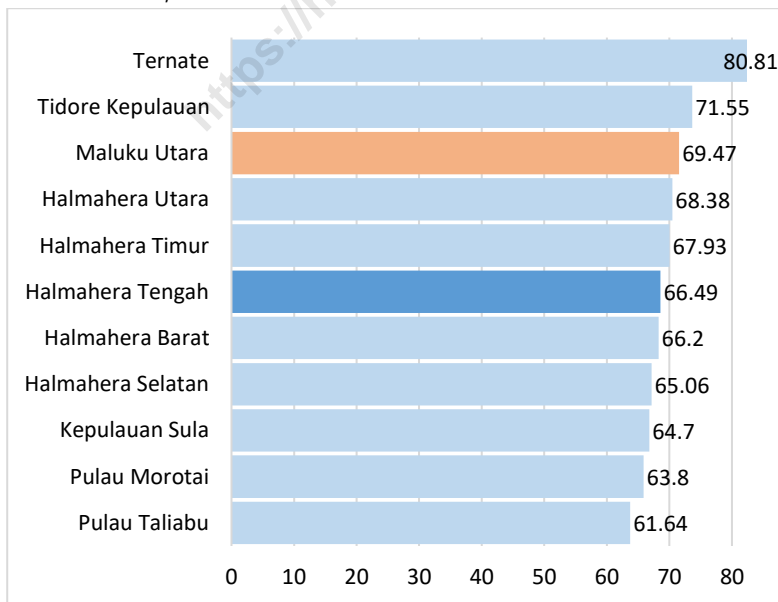
Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan perlu diukur pada suatu daerah. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam suatu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga ditargetkan mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai kabupaten induk yang dimekarkan menjadi Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur, IPM Halmahera Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kabupaten Halmahera Tengah berada di posisi kelima. Posisi ini lebih tinggi dari Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Peringkat pertama diraih oleh Kota Ternate diikuti Kota Tidore Kepulauan.

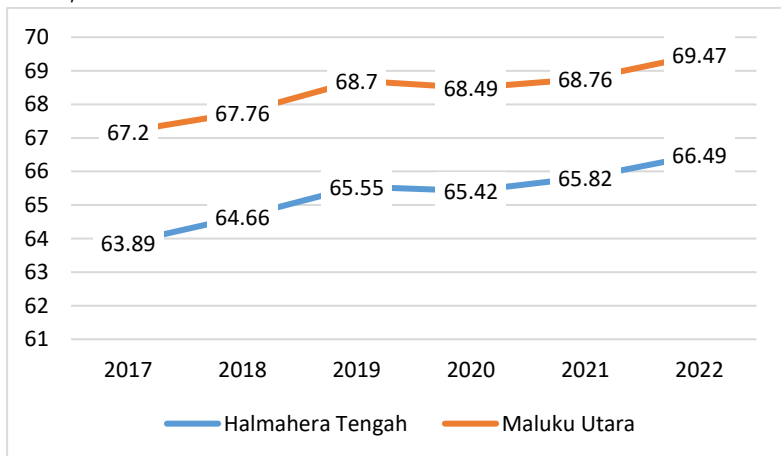
Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, 2022



Berdasarkan kriteria status pembangunan manusia dari UNDP, nilai IPM kurang dari 60 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 60 sampai kurang dari 70 digolongkan sebagai IPM sedang, dan nilai IPM antara 70 sampai kurang dari 80 termasuk tinggi, serta nilai IPM 80 keatas termasuk kategori sangat tinggi.

Mengacu pada kriteria pembangunan manusia dari UNDP, maka IPM Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun 2017 hingga 2022 tergolong dalam kategori sedang. Bila dilihat dari tahun 2017 hingga 2022, IPM Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan adanya kenaikan secara konstan, meskipun di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari 65,55 pada tahun 2019 menjadi 65,42 di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan dari 65,42 pada tahun 2020 menjadi 65,82 pada tahun 2021 dan 66,49 pada tahun 2022.

Gambar 3. IPM Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara, 2017-2022



4.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Umur Harapan Hidup digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini berguna dalam mengidentifikasi kualitas kesehatan, sebab pendapat umum mengatakan kesehatan yang baik akan memberikan peluang hidup lebih lama.

Nilai umur harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel, baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen, dapat dibuat daftar yang cukup panjang, di antaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan, dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*timelag*) tertentu, pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

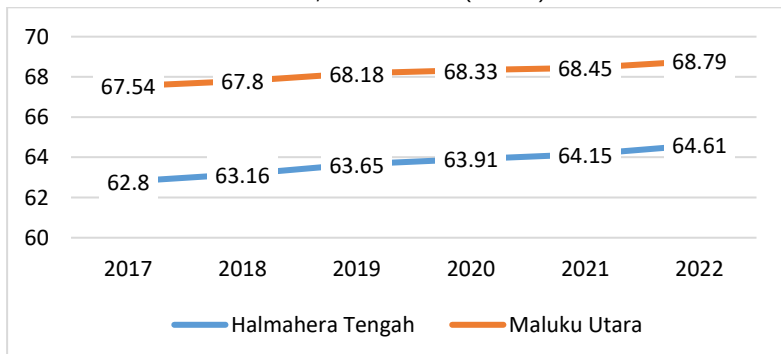
Sementara itu, masih terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap Umur Harapan Hidup. Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis, akan semakin

tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

Hingga tahun 2022, di Kabupaten Halmahera Tengah, tercatat ada 1 rumah sakit umum dan 11 puskesmas. Sementara itu, dari sisi tenaga kesehatan, jumlah dan komposisinya juga bisa dianggap memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat dengan rincian 63 tenaga medis, 302 tenaga keperawatan, 267 tenaga kebidanan, 55 tenaga kefarmasian, dan 167 tenaga kesehatan lainnya.

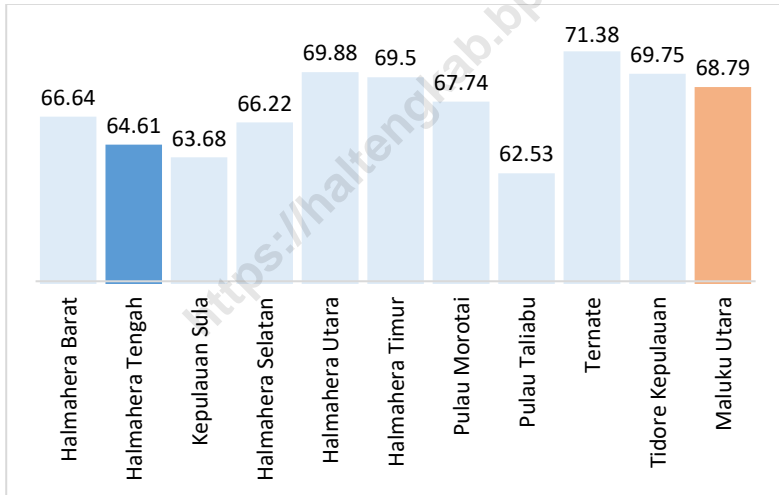
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Tengah meskipun nilainya masih terpaut jauh dengan UHH Maluku Utara.

Gambar 4. Umur Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara, 2017-2022 (tahun)



Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Maluku Utara, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Halmahera Tengah tercatat terendah ketiga (64,61 tahun) setelah Kabupaten Kepulauan Sula (63,68) dan Kabupaten Pulau Taliabu (62,53 tahun). Sedangkan umur harapan hidup tertinggi ada di Kota Ternate, diikuti Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan.

Gambar 5. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara tahun 2022 (tahun)



4.3 Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menciptakan insan-insan Indonesia yang berkualitas pada masa kini dan yang akan datang.

Kebutuhan sumber daya manusia untuk diikutsertakan dalam pembangunan semakin selektif dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, persaingan dalam bidang pendidikan juga semakin meningkat. Di satu sisi, tingkat pendidikan memberikan cerminan tentang tingkat kemampuan dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin luas wawasan berfikirnya dan sekaligus memberikan nilai tinggi pada status sosialnya.

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar bahwa banyak guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah perkotaan. Hal yang menjadi kendala di samping sarana dan prasarana itu adalah kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, penduduk lebih mementingkan peningkatan ekonomi keluarga secara harfiah daripada memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Fenomena semakin menurunnya partisipasi sekolah seiring tingginya level pendidikan bukan merupakan hal baru, terutama di wilayah Indonesia timur yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah. Daerah-daerah tangkapan (*catchment*) yang

cukup untuk mendukung sekolah lanjutan begitu luas, artinya banyak anak yang tinggal di luar jarak pulang-pergi yang wajar akibat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk pergi bersekolah, anak-anak di daerah terpencil harus meninggalkan rumah mereka menuju ke tempat yang memiliki sekolah atau tinggal lebih dekat dengan sekolah. Anak-anak enggan untuk meninggalkan rumah dan orang tua tidak memiliki dana untuk membayar biaya tambahan.

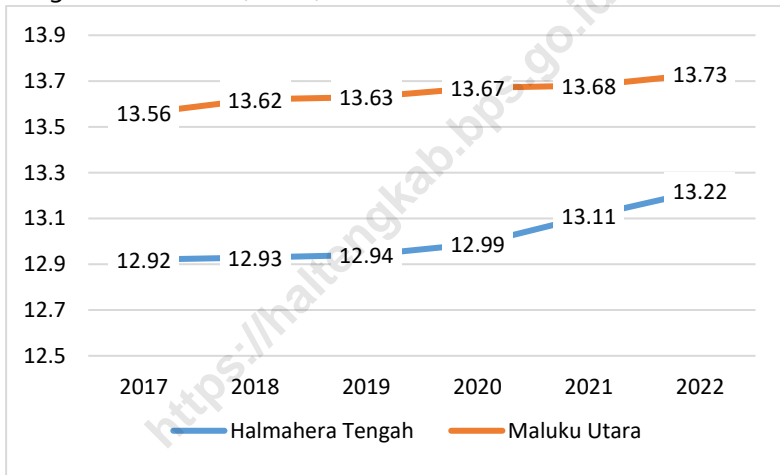
Peran serta masyarakat desa dalam pemecahan masalah di atas bisa dalam bentuk menyisihkan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun asrama gratis bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Bagi desa di kawasan lingkaran tambang, bisa menggandeng perusahaan tambang seperti dalam lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dengan metode baru, indikator angka melek huruf diganti menjadi angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, HLS Kabupaten Halmahera Tengah selalu mengalami kenaikan dari 12,92 tahun

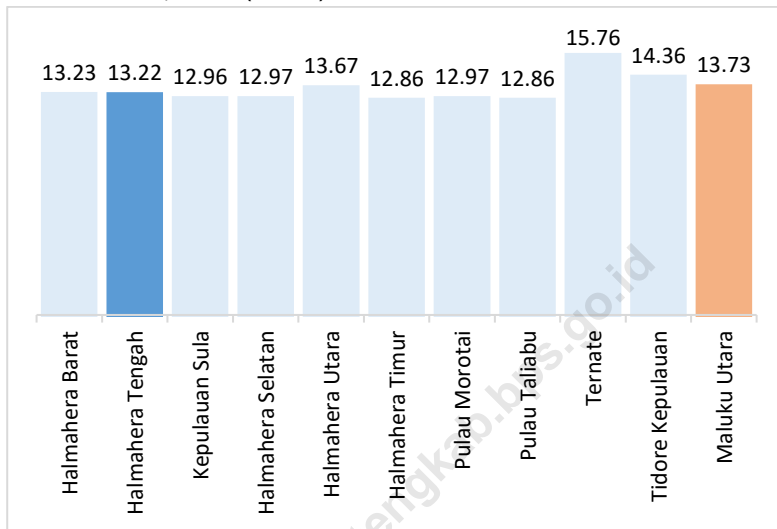
menjadi 13,22 pada tahun 2022. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 sebesar 13,22 atau 13 tahun, angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak yang ada di Halmahera Tengah memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan hingga D1.

Gambar 6. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (tahun)



Harapan lama sekolah di Halmahera Tengah termasuk peringkat kelima setelah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Barat. Besaran ini sedikit lebih baik dari Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, dan Pulau Morotai.

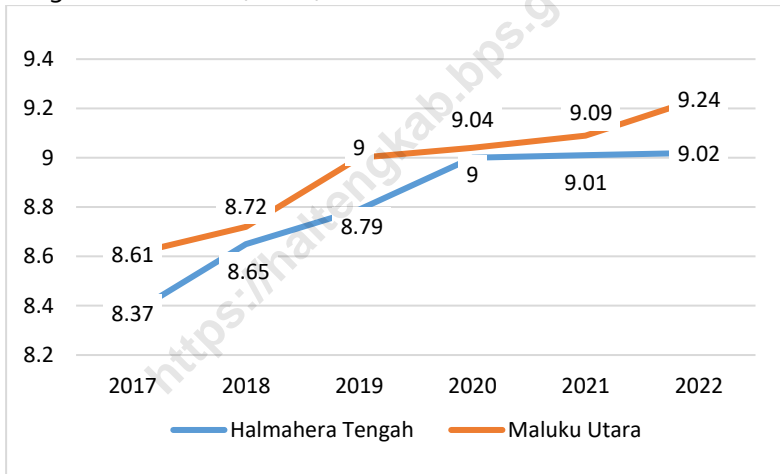
Gambar 7. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (tahun)



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

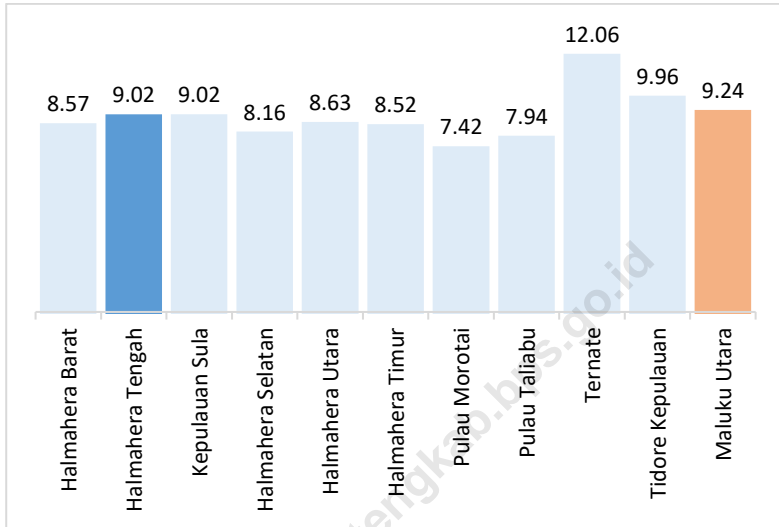
Rata-rata lama sekolah di Halmahera Tengah sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya penduduk Halmahera Tengah rata-rata bersekolah hingga kelas 1 atau 2 SMP pada tahun 2017, di tahun 2022 penduduk Halmahera Tengah rata-rata bersekolah paling tidak sampai kelas 3 SMP.

Gambar 8. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (tahun)



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara, rata-rata lama sekolah di Halmahera Tengah menduduki peringkat ketiga setelah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Besaran ini sedikit lebih baik dari Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula serta menjadi yang paling baik di pulau Halmahera.

Gambar 9. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (tahun)

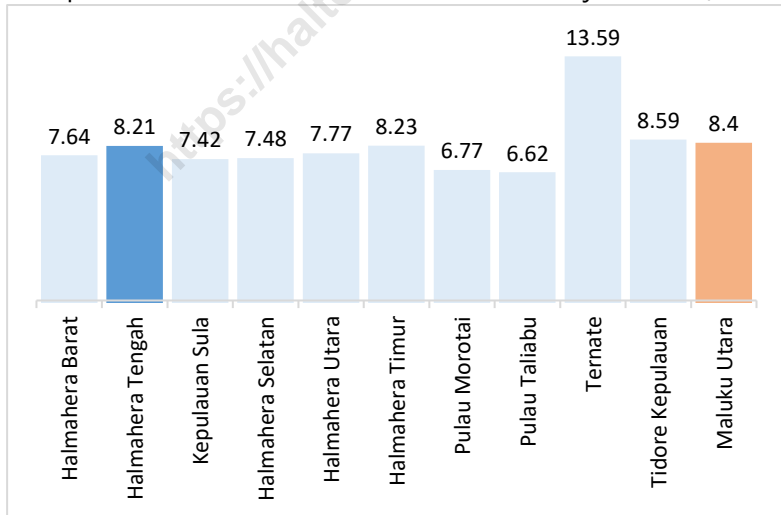


4.4 Kehidupan yang Layak

Pengeluaran per kapita riil disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran per kapita riil disesuaikan di Halmahera Tengah tahun 2022 mencapai 8,21 juta rupiah per tahun. Angka ini memiliki makna bahwa, rata-rata penduduk Halmahera Tengah memiliki pengeluaran setiap tahunnya sebesar 8,21 juta rupiah dalam kurun waktu satu tahun. Secara peringkat, besaran ini menduduki peringkat keempat tertinggi di Provinsi Maluku Utara setelah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan kabupaten dengan pengeluaran per kapita setahun yang paling rendah adalah Kabupaten Pulau Morotai dan Pulau Taliabu.

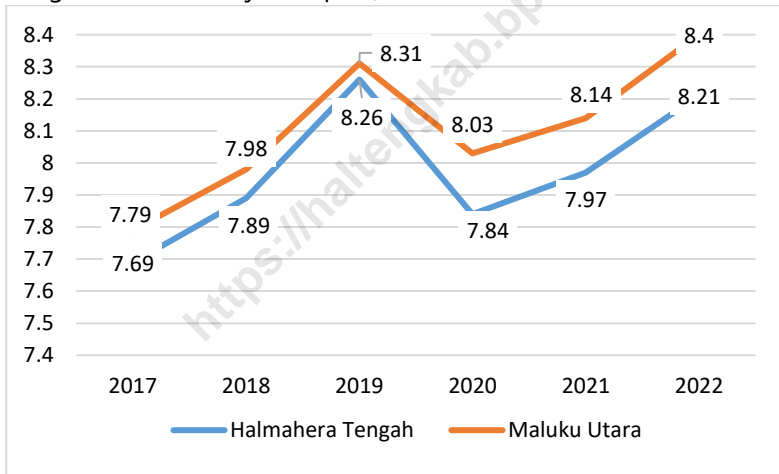
Gambar 10. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, 2022 (juta/tahun)



Jika dilihat dari perkembangan waktu yang terjadi sejak 2017 hingga tahun 2019, pengeluaran per kapita riil disesuaikan

Kabupaten Halmahera Tengah selalu mengalami peningkatan. Artinya, keseimbangan kemampuan belanja masyarakat Halmahera Tengah meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan di tahun 2020, nilainya turun 5,05 persen dari 8,26 juta rupiah per tahun menjadi 7,84 juta rupiah pertahun. Namun pada tahun 2021 dan 2022 nilainya kembali meningkat dari 7,84 juta rupiah menjadi 7,97 juta rupiah dan 8,21 juta rupiah.

Gambar 11. Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017-2022 (juta rupiah)



Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat di tahun 2020 yaitu adanya aturan pembatasan aktivitas di luar rumah bagi masyarakat dan pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha dari pemerintah sebagai respons untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Aturan-aturan yang dikeluarkan mendorong masyarakat untuk lebih

banyak berada di rumah dan menahan pengeluaran mereka, baik pada sektor makanan maupun non-makanan. Selain itu, ada sebagian masyarakat usaha dan pekerja kontrak yang memang kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pendapatan yang sebelumnya mereka terima akibat pembatasan aktivitas tersebut, secara otomatis tidak ada uang lebih yang dapat dikeluarkan untuk membeli kebutuhan pada komoditas makanan maupun non-makanan. Namun, pada tahun 2021, beberapa aturan pembatasan aktivitas mulai dikurangi akibat masifnya pemberian vaksin untuk Covid-19, sehingga banyak perkantoran dan tempat usaha yang kembali beroperasi. Pusat perbelanjaan, restoran, dan beberapa tempat wisata kembali ramai pengunjung yang pada akhirnya meningkatkan pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2022, aturan pembatasan aktivitas sudah ditiadakan sehingga aktivitas baik perkantoran, tempat usaha, pusat perbelanjaan restoran dan tempat wisata sudah mulai kembali beroperasi dengan normal. Hal ini sejalan dengan peningkatan pengeluaran masyarakat.

Kebijakan penguatan di sektor industri pengolahan, sebagai lapangan usaha terbesar yang menopang ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah harus diarahkan pada perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam segala aktivitas perusahaan, begitu juga pada sektor pertambangan. Selanjutnya, penguatan dan intensifikasi pembangunan pertanian harus diarahkan pada upaya meningkatkan hasil produksi dan nilai

tukar produk pertanian. Sementara itu, kebijakan yang mendorong penguatan sektor perdagangan hendaknya diarahkan pada penguatan dan pengembangan skala kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Penguatan sektor penopang ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian dan diharapkan mampu memulihkan daya beli masyarakat.

<https://haltengkab.bps.go.id>

BAB V

KESIMPULAN & SARAN



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. IPM Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 dengan metode penghitungan baru mencapai angka 66,49; lebih tinggi 0,67 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Capaian IPM Halmahera Tengah di angka 66,49 dikategorikan sedang menurut kriteria UNDP.
3. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran per kapita sebesar 246 ribu rupiah. Meningkatnya pengeluaran per kapita Halmahera Tengah disebabkan oleh peningkatan aktivitas di luar rumah bagi masyarakat dan bertambahnya kapasitas pengunjung pada tempat-tempat usaha sebagai respons dari masifnya pemberian vaksin Covid-19 pada masyarakat. Selain itu, peningkatan IPM tahun 2022 juga disebabkan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup sebesar 0,46 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 0,11 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,01 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran di Halmahera Tengah sudah lebih baik.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM Halmahera Tengah cenderung mengalami peningkatan namun masih dalam kategori sedang menurut UNDP. Oleh karena itu, prioritas pembangunan tetap harus dipacu di sektor dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan tanpa mengabaikan salah satu sektor.
2. Pada dimensi kehidupan yang layak, upaya mendorong daya beli masyarakat sebaiknya difokuskan pada pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sektor industri pengolahan dengan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sehingga dapat berpartisipasi dalam segala aktivitas perusahaan. Selain itu, pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor dominan beberapa tahun terakhir di Kabupaten Halmahera Tengah juga perlu ditingkatkan. Intensifikasi pembangunan pertanian harus diarahkan pada upaya meningkatkan hasil produksi dan nilai tukar produk pertanian, serta efisiensi biaya.
3. Pada dimensi pendidikan, upaya untuk menghadapi isu ketimpangan distribusi tenaga pendidik ke daerah terpencil yaitu dengan mendorong adanya analisis kebutuhan tenaga pendidikan di masing-masing wilayah serta diikuti

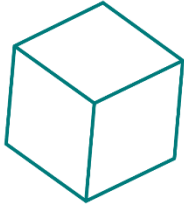
penertiban tenaga pendidik untuk ditempatkan sesuai peta kebutuhan tenaga pengajar di Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya yaitu menambah jumlah institusi pendidikan luar sekolah (kelompok belajar/kejar paket) khususnya paket A dan B, mengoptimalkan distribusi dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS), serta penguatan muatan kurikulum berbasis potensi lokal yang adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian, dalam menghadapi isu angka putus sekolah akibat jarak dan keterbatasan infrastruktur sekolah, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengalokasikan anggaran desa untuk membangun asrama bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

4. Pada dimensi kesehatan, penyediaan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk miskin melalui penyederhanaan sistem berobat, penyediaan *ambulance* dalam bentuk kapal cepat (*speedboat*) mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kondisi darurat, penambahan jumlah dan mutu kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta penguatan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program desa siaga dan sanitasi total berbasis masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

5. Secara holistik, keberadaan perusahaan tambang dan industri pengolahan besar di Halmahera Tengah dapat dijadikan katalisator dengan mendorong adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk membantu gerakan pemberantasan buta huruf, layanan kesehatan gratis, pendidikan keterampilan petani kebun dan nelayan skala menengah besar berbasis agroindustri.

<https://haltengkab.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Jl. Poros Weda - Payahe

Email : bps8202@bps.go.id

Website : <http://haltengkab.bps.go.id>

ISSN 2797-4359



9 772797 435006 >